

Kelemahan Utama, Masalah Kepemimpinan

K.H. Saifuddin Zuhri, Rois III PB Syuriah NU, bekas Menteri Agama dan bekas anggota MPR/DPR

Islam mendukung politik dan menempatkannya sebagai kewajiban bersifat kolektif (*fardlu kifayah*). Dalam Islam, konsep tersebut mustilah diimplementasikan melalui prinsip-prinsip kebersamaan dan musyawarah (*syuro*), yang dilandasi sikap saling membuihkan, jujur dan benar-benar mempraktekkan moralitas dan mentalitas mulia (*al akhlaqul karimah*). Berpijak pada konsep ini, perbedaan sistem politik dari negara yang menamakan dirinya Negara Islam, selama mereka memegang teguh prinsip tersebut sebenarnya tidaklah menjadi persoalan. Musyawarah itu sendiri berdasarkan atas kebenaran di antara para ahli di bidangnya masing-masing (*musyawarah ma'al haqqi wa ahlihi*).

Semuanya itu harus digali dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan tidak menginterpretasikannya menurut kehendak hawa nafsu, apalagi jika motivasinya untuk mempertahankan kekuasaan politik maupun ekonomi. Motivasi seperti itu pasti akan melahirkan *image* kezaliman, meskipun sebagai negara Islam. Jadi aspirasi Islam yang diperjuangkan adalah agar ajaran-ajaran Islam itu dapat dipraktekkan oleh para pemeluknya secara proporsional, sementara dalam kuasa hukum memberi kewenangan secara yuridis. Inilah yang telah diperjuangkan partai-partai Islam di Indonesia sejak dahulu, sesuai dengan wewenang yang ada dalam Pasal 29 UUD 45.

Meski Sama, Bisa Berbeda

Dalam kerangka itu, pada tingkat pertama ada *palilah hukum* yang membenarkan tumbuhnya cita-cita tersebut secara terorganisasi. Masyarakat pun makin terlatih dengan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika dalam naungan negara, dan akan terlatih dengan kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi arti toleransi tanpa mengurbankan prinsip. Jika hal itu telah membudaya,



K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

sikap konfrontatif akan dapat dihindari. Kendati prinsip berbeda, pendapat tetap terjamin, sesuai dengan asas setuju untuk berbeda. Untuk itu batin harus siap menghadapi kemungkinan yang logis dari konsekuensi demokrasi dan sikap toleransi. Misalnya, meskipun sama-sama Pancasilais belum tentu mempunyai pandangan dan sikap yang sama dalam menanggapi satu masalah menurut konsepsi politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan keamanan dan sebagainya. Inilah sebetulnya spektrum dari asas Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Islam sendiri juga begitu. Meskipun landasan hukumnya sama, tolok ukurnya sama, bahkan aliran madzhabnya—jika ia bermadzhab—juga sama, tapi cara pengambilan sikapnya dalam suatu kasus bisa berbeda. Itulah sebabnya dalam kalangan *Ahlus Sunnah wal-Jamaah* terdapat madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Perbedaan-perbedaan itu jangan diartikan negatif. Perbedaan dalam konteks terse-

but tentu menjadi rahmat.

Dalam zaman Orde Baru kita kenal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyuarkan aspirasi umat Islam. Sejak dari pembentukannya pada tahun 1973, PPP memanglah dimaksudkan sebagai partai yang mengibarkan bendera Kaabah dan memperjuangkannya. Kelemahan PPP sekarang ini—justeru ini faktor utamanya—adalah mesin *leadership*-nya. PPP tidak digcrakkan dengan semestinya, sehingga tidak seimbang dengan antusiasme yang diberikan oleh massa pendukungnya. Saat-saat yang amat baik terlewatkan begitu saja, antara lain karena iklim demokrasi dalam partai tidak dikembangkan. Lambat laun sistem kepengurusan makin tidak membuka peluang bagi tersusunya kepemimpinan melalui saringan organisatoris, karena asas kesatuan dan persatuan di dalam tidak memperoleh porsi secara proporsional.

Bila Kesatuan tanpa Persatuan

Kelemahan lain adalah partai yang lahir dan besar, karena saham yang diberikan masing-masing unsur di dalamnya ini tidak diimbangi dengan sistem kepengurusan yang mencerminkan kebersamaan. Akibatnya, hanya menumbuhkan kepengurusan yang lebih menitik beratkan kepada slogan kesatuan tanpa mengindahkan unsur persatuan. Kepengurusan yang demikian menjadi kering dan tertutup. Hampa tapi otoriter. Selamanya, partai yang tidak mengembangkan demokrasi tentulah tidak menumbuhkan budaya musyawarah dan tidak mempunyai program yang didukung aspirasi partai. Partai menjadi tidak mampu memberikan sumbangan kepada negara. Slogan-slogannya hanya bersifat musiman menurut apa yang sedang menjadi mode politik. Akibatnya hubungan partai dengan pendukungnya makin renggang. Kini, secara dewasa organisasi massa Islam memilih sendiri jalan yang akan ditempuh dan mengarahkan simpatinya kepada parpol yang ada. Hal ini mereka tempuh mengingat kelestarian ideologis dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sebagai orang yang beriman mereka pun senantiasa berkeyakinan *Al baqou lillah* yaitu hanya Allahlah yang bersifat kekal. Sebagai pejuang, kami terpanggil untuk

bersikap maju dan siap mengadakan inovasi di mana diperlukan, dalam arti mempertahankan yang baik dan memperjuangkan yang lebih baik. Jika Golkar, mungkin juga PDI (tidak hanya PPP) juga menyuarkan aspirasi Islam, itu pertanda bahwa Islam mempunyai kelebihan-kelebihan hingga partai yang tidak memanggul bendera Islam merasa berkeharusan menyuarkan Islam. Jika hal itu berdasarkan keikhlasan niat, beruntunglah umat Islam. Namun bila didorong niat pamrih yang tidak *lillahi ta'ala*, beruntunglah Islam tetapi mereka tidak akan memperoleh keuntungan apa-apa, kecuali kepuasan sekejap.

Letak kelemahan dari pelaksanaan konsep-konsep kehidupan Islami itu selalu terletak pada para pemimpin yang lupa akan tanggung jawab mereka. Ada kalanya karena silau akan keadaan sekeliling, ada kalanya karena takut, akan kerapuhan kedudukannya. Padahal, bila mereka pemimpin yang baik seharusnya menyadari bahwa, pada suatu ketika kursi kepemimpinannya harus diserahkan kepada orang lain yang siap berdasarkan musyawarah.

Pokok Persoalan, Iman Pemimpin

Bagi saya, pokok dari persoalan ini adalah *iman*. Jika iman tidak kukuh dan takwa cuma menjadi slogan, dalam prakteknya, politik hanyalah berkuasa untuk kuasa, lebih mengutamakan golongan daripada kepentingan bersama, dan politik berubah menjadi *jargon* untuk memanipulir persatuan dan kemajuan dan sebagainya. Jika kritik dan nasihat tidak lagi berfungsi, politik untuk politik akan menjadi sumber fitnah. Sejarah Islam telah banyak membuktikan, kemelut yang terjadi pada zaman Khalifah Usman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan akibat yang ditimbulkan fitnah. Fitnah itu yang memarak-perandakan fungsi politik yang semula menjadi alat penataan masyarakat untuk menyelenggarakan keadilan, kesejahteraan dan tolong menolong menjadi alat untuk mengejar kekuasaan semata-mata. Dalam hal ini, para khalifah tersebut tidak berdaya membendung gelombang fitnah. Bahkan, ikut menjadi kurban fitnah.

Jauhkan Dakwah dari Politik

H.A.R. Fachruddin, Ketua Umum P.P. Muhammadiyah

Pada saat didirikan, Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah yang ingin agar masyarakat Islam di Indonesia menjalankan Islam dengan cara yang benar dan tepat, karena jika berhasil umat tidak akan mengalami kemiskinan, kebodohan dan ketertindasan seperti yang dirasakan pada masa penjajahan. Cara hidup yang Islami dipandang sebagai faktor peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya tidak menempuh jalan melalui politik, tetapi dengan dakwah, dengan menyelenggarakan sekolah-sekolah baik umum maupun yang khusus agama, sementara di bidang sosial lewat panti asuhan dan rumah sakit, mendirikan mesjid, dan sebagainya.

Ibadah

Cara hidup Islami yang benar dan tepat ini sungguh-sungguh menjadi dasar dakwah Muhammadiyah, sebab ada juga cara menjalankan Islam yang benar, tapi belum tentu tepat. Misalnya, umat yang terlalu menggantungkan diri pada kyainya, sampai-sampai umat yang bersangkutan tidak menggunakan akalanya. Dalam keadaan seperti itu ada kyai yang sanggup menjamin pengikutnya masuk surga, padahal tiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang penting bagi Muhammadiyah, mengajak umat untuk hidup dengan cara Islam ini. Sebagai organisasi yang sama sekali tidak menjalankan kegiatan politik, tidak melarang anggotanya melakukan kegiatan politik asalkan tidak melalui Muhammadiyah. Bisa melalui PPP, Golkar, atau PDI, sebab melalui Muhammadiyah hanya ada dakwah.

Dalam cara hidup Islami dikenal akidah dan ibadah. Dengan ibadah ada yang sifatnya khusus dengan ketentuan-ketentuannya yang tak bisa ditawar. Misalnya saja, jumlah *rakaat* dalam *shalat*, puasa dalam bulan Ramadhan, dan sebagainya. Sedang yang si-

fatnya umum, ya segala kegiatan dalam masyarakat yang dilakukan dengan itikad karena Allah. Ya, kegiatan apa saja; mengajar, tani, dagang; asal dilakukan karena Allah, itu ibadah. Pokoknya, selama orang menjalankan kehidupan yang sesuai dengan Qur'an dan Hadist, itulah yang menjadi cita-cita Muhammadiyah.

Pendidikan Islami

Di antara organisasi swasta, sekolah-sekolah Muhammadiyah paling banyak jumlahnya. Seberapa jauh pendidikan cara hidup Islami di sekolah-sekolah masih menjadi masalah. Peranan Sekolah umum sangat kecil mengingat persentase pelajaran keislaman yang diberikan sangat kecil dibanding dengan mata pelajaran umum. Untuk meningkatkan pendidikan cara hidup Islami ini, kami mengusahakan agar fakultas-fakultas agama di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah bebas uang kuliah. Semula memang peminatnya kurang. Kalau dibanding dengan fakultas teknik, ekonomi, atau fakultas lainnya, kini, mahasiswa jurusan agama ini sudah semakin banyak. Organisasi Muhammadiyah di daerah-daerah mengirim mahasiswanya. Diharapkan fakultas-fakultas ini dapat menjadi semacam pendidikan kader Islam.

Selain itu saya juga ingin orang-orang muda lebih banyak melibatkan diri dalam Muhammadiyah. Saya melihat zaman berubah, masyarakat semakin berkembang, dan umat Islam makin memerlukan pimpinan orang-orang pintar. Walaupun mungkin di antara orang tua ada yang menyepelkan Muhammadiyah, si anak didik janganlah berkecil hati. Memang masih ada orang-orang tua yang menganggap remeh kalangan yang bukan kyai. Kendati begitu kami yakin di masa depan semakin banyak diperlukan tokoh Islam yang pintar, ahli dalam berbagai

bidang bukan hanya di bidang agama. Yang penting mereka menjalankan cara hidup Islami, sebab ibadah bukanlah hanya salat, puasa dan lainnya, tapi juga kegiatan dalam kehidupan ini.

Aspirasi Politik

Muhammadiyah bukan tempat menyalurkan aspirasi politik. Untuk menyalurkan aspirasi politik sudah ada partai politik dan Golkar. Baik di parpol maupun Golkar juga ada umat Islam. Jadi kalau mau memperjuangkan aspirasi Islami, bagi umat Islam sudah ada salurannya. Kalau orang per orang sudah menjalankan kehidupan sesuai dengan cara Islam yang benar dan tepat, ya dengan sendirinya akan lahir kehidupan politik yang Islami. Misalnya umat memilih pemimpinnya di bidang politik sesuai dengan Islam. Tentu saja kita tak bisa meniru cara kenegaraan di zaman Muhammad Rasulullah, sebab berbeda keadaannya. Begitu juga tak bisa dibandingkan dengan Brunei, sebab penduduk di sana homogen beragama Islam, dan jumlahnya juga cuma beberapa ratus ribu orang. Sedangkan kita, sekitar 150 juta jiwa, terdiri atas berbagai agama, sedangkan di Brunei mereka bisa saja menetapkan yang ingin jadi warganegara harus beragama Islam. Kita tentunya tak mungkin.

Sampai saat ini Muhammadiyah tidak pernah membicarakan konsep kenegaraan yang Islami. Kalau pun mau mencari konsep kenegaraan yang Islami, dalam Qur'an dan Hadist ada petunjuknya. Cuma untuk mengajikannya dari negara-negara yang menyatakan dirinya negara Islam, tentunya tidak gampang, sebab negara Islam yang murni hanya ada pada masa Nabi Muhammad, kemudian semasa kalifah sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Usman, dan di masa Ali. Setelah itu sulit untuk dikatakan ada negara Islam yang murni, sebab kekalifahan yang kemudian sudah dipengaruhi sifat kebangsaan masing-masing negara. Begitu juga Saudi Arabia bersifat kerajaan, padahal dalam Islam tidak dikenal cara dinasti.

Dakwah dan Politik

Muhammadiyah memang pernah ikut dalam kegiatan politik praktis. Setelah kemer-



H.A.R. FACHRUDDIN

dekaan, Muhammadiyah bersama-sama dengan organisasi dan gerakan Islam lainnya bergabung dalam Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Waktu itu Masyumi dipandang sebagai wadah seluruh umat Islam. Artinya, umat Islam menjadi satu, dan menganggap organisasi itu sebagai wadah menyalurkan aspirasi politiknya. Selain itu setiap gerakan Islam yang ada dalam Masyumi menjadi anggota istimewa. Dalam keputusan-keputusan politiknya, Masyumi mendengar lebih dulu suara gerakan-gerakan Islam yang bergabung itu misalnya, dalam penentuan pembentukan kabinet, suara Muhammadiyah diperhatikan.

Tapi belakangan berbagai organisasi Islam menyatakan diri keluar dari Masyumi. Syarikat Islam, Nahdlatul Ulama, dan lain-lainnya, masing-masing menjadi partai. Waktu itulah Muhammadiyah sudah merasa tak ada lagi gunanya turut serta dalam Masyumi, karena Masyumi sudah bukan sebagai wadah tunggal penyalur aspirasi politik umat Islam. Lebih-lebih setelah Masyumi dibubarkan pemerintah, otomatis Muhammadiyah berdiri sendiri kembali.

Selama bergabung dalam Masyumi pun sebenarnya Muhammadiyah tidak pernah menghentikan kegiatan dakwah dan sosialnya. Cuma waktu itu dakwah dan politik

tidak dipisahkan. Baru setelah tahun 1971 diputuskan untuk lepas sama sekali dari politik praktis. Ketika itu umat menginginkan lahirnya kembali partai Islam. Semula mau menghidupkan kembali Masyumi. Tapi pemerintah, dalam hal ini ABRI sudah "alergi" mendengar nama Masyumi. Ada tawaran agar Muhammadiyah saja menjadi partai politik, tapi kami tolak, itu sebabnya lahir Parmusi. Sejak itu Muhammadiyah betul-betul tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi anggotanya secara pribadi, silakan.

Dakwah memang harus dijauhkan dari politik. Berpolitik dilakukan melalui organisasi politik, sedang melalui Muhammadiyah hanya dakwah yang mengajar hidup sesuai dengan Islam. Ini mungkin lebih cocok, mengingat masyarakat kita belum cukup dewasa. Dakwah yang bercampur politik bisa membawa akibat yang tidak diinginkan. Misalnya saja sebutan "negara Islam", sudah barang tentu tidak ingin didengar pemerintah. Bagi kami berdakwah lebih baik agar umat Islam di Indonesia menjalankan cara hidup yang Islami, dan menjadi bersatu bertolak dari sumber yang sama Qur'an dan Hadist. Akan lebih baik lagi kalau umat Islam bersatu dalam satu pimpinan. Artinya, ada figur nasional yang dapat menyatukan umat Islam. Bila ini dapat diwujudkan saya yakin cara hidup yang Islami di segala bidang dapat dilaksanakan.

Dialog dengan Pemerintah

Cara hidup yang Islami ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Pimpinan nasional

telah berkali-kali menyatakan, Pancasila bukan agama, dan tidak akan dijadikan agama. Begitu juga sebaliknya. Bagi Muhammadiyah menjadikan Pancasila ini sebagai dasar organisasi tidak jadi masalah. Cuma jangan dikatakan sebagai azas tunggal. Pimpinan nasional pernah saya temui untuk membicarakan soal ini. Yang jelas, Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah Islam, dapat tetap mempertahankan identitasnya, sebab Pemerintah tidak akan menghilangkan dasar Islam dari Muhammadiyah, walaupun Pancasila harus dicantumkan dalam anggaran dasar. Jadi kalau Muhammadiyah harus menghilangkan dasar Islamnya, diganti dengan Pancasila, tentunya tidak bisa. Muhammadiyah tetap memiliki identitasnya sebagai gerakan Islam, gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*, bekerja atas dasar Qur'an dan Hadist, dan di bawahnya dicantumkan azas Pancasila. Dengan demikian Pancasila sebagai azas kenegaraan dan azas kemasyarakatan, sesuai dengan undang-undang dasar negara. Cuma Muhammadiyah bukan bergerak dengan motivasi Pancasila, tetapi karena Islam. Dengan mencantumkan Pancasila, dimaksudkan gerak Muhammadiyah tidak akan ke luar dari Pancasila.

Kalau ada organisasi Islam misalnya HMI berkeras untuk tidak memasukkan Pancasila dalam anggaran dasarnya, mungkin karena kurang berdialog dengan pemerintah. Muhammadiyah sendiri belum menyelenggarakan muktamar untuk mengubah anggaran dasarnya, bukan karena sulit untuk memasukkan Pancasila, tapi menunggu kepastian adanya undang-undang keormasan.

